

SMART DEFENSE DAN DUAL STRATEGY - APLIKASINYA TERHADAP UPAYA PERTAHANAN LAUT NUSANTARA DI SEKITAR ALKI I

Luthfi Kurniady Santoso

Pasis Dikreg Seskoal Angkatan Ke-64

Email:radenrama011@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i2.195>

Abstrak

Penerapan konsep *Smart Defense* dan *Dual Strategy* dalam upaya pertahanan laut Indonesia, khususnya di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I merupakan sebuah metode alternatif meningkatkan kekuatan pertahanan di area dimaksud. ALKI I merupakan jalur strategis yang menghubungkan berbagai perairan internasional dan berpotensi menghadapi berbagai ancaman, termasuk klaim sepihak oleh negara lain dan aktivitas ilegal. Dengan memadukan teknologi canggih dalam pertahanan maritim dan pemberdayaan kearifan lokal, *Smart Defense* bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di ALKI I. Sementara itu, *Dual Strategy* menekankan pentingnya diplomasi pertahanan dan pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis konteks geostrategis dan tantangan yang dihadapi Indonesia, serta menyusun rekomendasi implementasi kedua konsep tersebut.

Kata Kunci: ALKI I, *Dual Strategy*, *Smart Defense*

Abstract

The application of the Smart Defense and Dual Strategy concepts in Indonesia's maritime defense efforts, particularly around the Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI) I, serves as an alternative method to enhance defense capabilities in the region. ALKI I is a strategic route that connects various international waters and is susceptible to various threats, including unilateral claims by other countries and illegal activities. By integrating advanced technology in maritime defense and empowering local wisdom, Smart Defense aims to improve surveillance and security in ALKI I. Meanwhile, the Dual Strategy emphasizes the importance of defense diplomacy and the development of the Indonesian Navy's capabilities to maintain national sovereignty. This research employs a literature study method to analyze the geostrategic context and challenges faced by Indonesia, as well as to formulate recommendations for the implementation of both concepts..

Keywords: ALKI I, *Dual Strategy*, *Smart Defense*

PENDAHULUAN

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I merupakan satu dari tiga alur laut yang wajib diberikan Indonesia kepada dunia sebagai bentuk imbal balik diterimanya usulan Indonesia ke dalam UNCLOS sehingga seluruh pulau yang membentuk negeri ini menjadi satu kesatuan yang utuh (United Nations, 1982). ALKI I menjadi alur sangat strategis atas keberadaannya yang bersinggungan dengan salah satu *choke point* pelayaran internasional terpadat dengan nilai ekonomi sangat tinggi, yaitu Selat Malaka (Wicaksa, 2019). Kondisi ini membuat ALKI I memerlukan perhatian khusus terhadap berbagai potensi ancaman, termasuk perompakan dan kejahatan maritim yang sering terjadi di Selat Malaka, di mana lebih dari 90.000 kapal melintas setiap tahun dan menghadapi risiko seperti pembajakan serta perdagangan manusia (Saraswati & Pinatih, 2020).

Di Utara, ALKI I selain bersinggungan dengan Selat Malaka, juga berdekatan dengan Laut Natuna Utara dimana pada laut ini ada sebagian wilayah perairan yang diklaim oleh Tiongkok sebagai laut teritorial milik mereka melalui *Nine-Dash Line* (Maulana, 2020). Klaim ini, yang diperbarui menjadi *Ten-Dash Line* pada 2023, bertentangan dengan UNCLOS 1982 dan menimbulkan ketegangan regional, termasuk dengan Indonesia yang menolaknya karena tidak memiliki dasar hukum internasional

(Baylon, 2021; Kompas, 2021). Selain itu, Selat Karimata yang menjadi jalur strategis juga menghadapi kerawanan penyelundupan dan aktivitas transnasional yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, dengan kerugian nelayan mencapai Rp16,5 miliar dalam tiga bulan akibat perompakan (Mongabay, 2016a).

Konsep *Smart Defense* dan *Dual Strategy* merupakan pendekatan strategis yang diusung oleh Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional (Wicaksono, 2023). Konsep ini dibangun berdasarkan empat komponen utama, yaitu intelijen, pertahanan, keamanan, dan siber. Keempat komponen ini kemudian diintegrasikan melalui dua pendekatan utama: *Smart Defense* dan *Dual Strategy*. *Smart Defense* dan *Dual Strategy*, berdasarkan definisinya, dapat diterapkan dalam konteks pertahanan laut Nusantara, khususnya di ALKI I. Hal ini sebagai bentuk langkah strategis menghadapi ancaman yang mungkin muncul dari berbagai permasalahan yang ada di ALKI I saat ini. Untuk mengupas lebih mendalam tentang *Smart Defense* dan *Dual Strategy* – Aplikasinya Terhadap Upaya Pertahanan Laut Nusantara Di Sekitar ALKI I, penelitian ini disusun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur yang mengacu pada sumber-sumber akademik

dan dokumen resmi pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan artikel berita yang relevan dengan topik pertahanan laut dan kebijakan keamanan Indonesia.
2. **Analisis Kualitatif:** Menganalisis informasi yang diperoleh untuk memahami konteks geostrategis IKN Nusantara dan tantangan yang dihadapinya.
3. **Penyusunan Rekomendasi:** Berdasarkan analisis, menyusun rekomendasi mengenai penerapan Smart Defense dan Dual Strategy dalam konteks pertahanan laut di ALKI I.

PEMBAHASAN

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan upaya Indonesia untuk mengatur lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional di wilayah perairan Indonesia. Penetapan ini didasarkan pada penafsiran Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1996, dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 (Pemerintah Indonesia, 1996; Pemerintah Indonesia, 2002). Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, ALKI didefinisikan sebagai alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara

normal, semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin, serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya (Pemerintah Indonesia, 1996).

Salah satu ALKI yang penting adalah ALKI I. ALKI I merupakan alur laut yang difungsikan untuk pelayaran dari dua jalur perdagangan utama dunia (Laut China Selatan melintasi Laut Natuna dan Selat Malaka melintasi Pulau Bintan), Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda menuju Samudra Hindia, dan sebaliknya. Selain itu, jalur ALKI I juga digunakan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna, dan sebaliknya. Penetapan ALKI I ini memiliki tujuan strategis bagi Indonesia. Pertama, membuka akses bagi pelayaran internasional untuk melintasi wilayah perairan Indonesia secara aman, cepat, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip lintas damai yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations, 1982). Kedua, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perairan Indonesia, khususnya di Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Ketiga, memfasilitasi aktivitas ekonomi maritim, seperti perdagangan dan transportasi laut internasional, yang memanfaatkan jalur ALKI I.

Atas situasi ini, keberadaan ALKI I juga memberikan manfaat bagi Indonesia dalam aspek keamanan dan pertahanan. Jalur ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif terhadap lalu lintas kapal asing yang melintas di wilayah perairan Indonesia. Hal ini penting untuk mencegah ancaman keamanan, seperti penyelundupan, perompakan, dan aktivitas ilegal lainnya.

Namun, ALKI I juga memunculkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah klaim sepihak dari Tiongkok atas Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara (Maulana, 2020). Klaim ini menimbulkan risiko bagi Indonesia. Tiongkok sering kali melakukan aktivitas militer dan penegakan hukum di wilayah yang diklaimnya, yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia (Baylon, 2021).



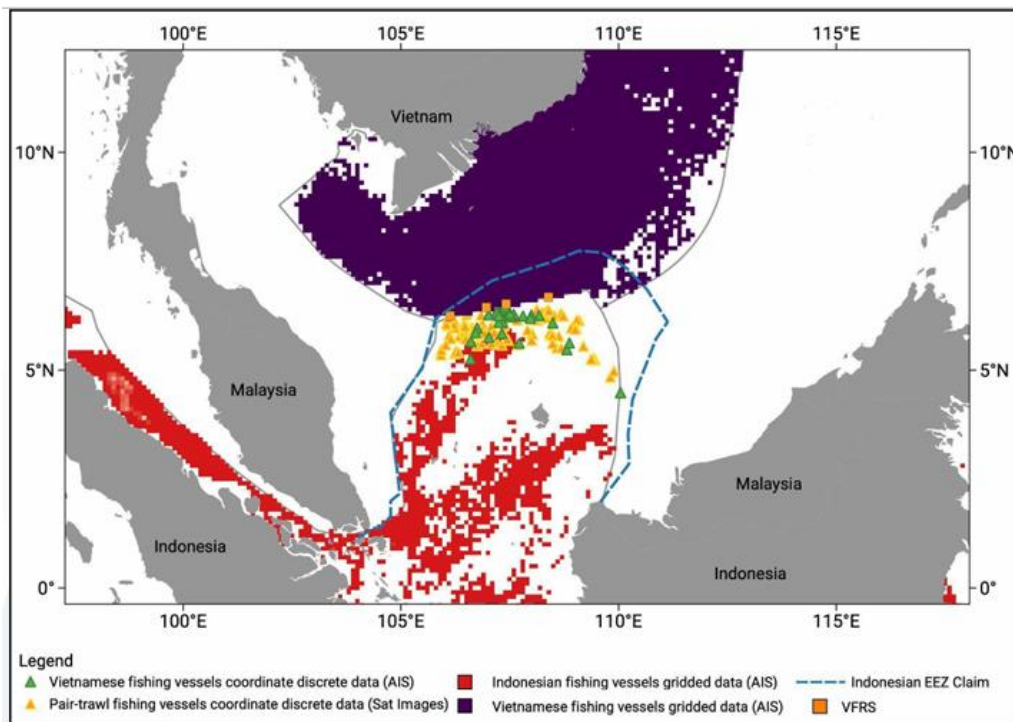
Gambar 1. Tumpahan Minyak di Pesisir Nongsa Pulau Batam, 5 Mai 2023
Sumber: Kompas

Selat Karimata, yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada selat ini terdapat ratusan pulau kecil yang menjadikannya sebagai jalur strategis yang sering digunakan untuk aktivitas ilegal (Mongabay, 2016b). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari laporan Indonesia *Ocean Justice Initiative* (IOJI) periode April 2023 s.d. Januari 2024 tercatat; Kapal riset *Jia Geng* (29 April hingga 01 Mei 2023) dan *Nan Feng* (1 s.d 3

Mei 2023) dari Tiongkok terdeteksi di Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia perlu meminta klarifikasi dari Tiongkok terkait aktivitas riset ini dan mengambil tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran, seperti pengambilan sampel tanpa izin; Pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura menyebabkan pencemaran laut yang berdampak pada perairan Indonesia; Aktivitas penangkapan ikan oleh kapal-kapal Vietnam di LNU masih marak, yang

menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kesepakatan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam; Deteksi menunjukkan pelanggaran oleh kapal Indonesia yang menggunakan alat tangkap

jaring tarik berkantong di WPP-711, yang beroperasi di luar izin. Sanksi tegas diperlukan untuk mencegah konflik sosial antara nelayan lokal dan kapal penangkap ikan.



Gambar 2. Aktivitas Perikanan di Laut Natuna Utara Sepanjang Tahun 2023
Sumber: Laporan IOJI, 2023

Atas situasi disampaikan, diperlukan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, salah satunya yang ditawarkan peneliti adalah implementasi konsep *Smart Defense* dan *Dual Strategy* pada ALKI I. Konsep *Smart Defense* dan *Dual Strategy* merupakan pendekatan strategis yang diusung oleh Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional (Wicaksono, 2023). Konsep ini dibangun berdasarkan empat komponen utama, yaitu intelijen, pertahanan, keamanan, dan siber. Keempat komponen ini kemudian diintegrasikan

melalui dua pendekatan utama: *Smart Defense* dan *Dual Strategy*.

Smart Defense. *Smart Defense* adalah konsep yang menggabungkan elemen "*Hard Defense*" dan "*Soft Defense*" (Bakrie, 2022). *Hard Defense* antaranya peningkatan kapasitas teknologi TNI Angkatan Laut. Penggunaan teknologi canggih seperti drone, sistem radar, dan teknologi pengawasan maritim dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memantau dan menjaga keamanan di ALKI I. Drone dapat digunakan untuk melakukan patroli udara, memberikan informasi *real-time*

tentang situasi di laut, serta mendeteksi aktivitas mencurigakan (Terra Drone, 2023). Dengan kemampuan pengawasan yang lebih luas dan akurat, drone dapat membantu mengidentifikasi potensi ancaman sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Sistem radar yang lebih modern dapat meningkatkan deteksi kapal dan aktivitas di perairan, memungkinkan pihak berwenang untuk merespons dengan cepat terhadap potensi intrusi atau tindakan ilegal di wilayah perairan Indonesia (Dotulung, 2020). Investasi dalam teknologi pengawasan maritim juga sangat penting. Sistem ini dapat mencakup penggunaan sensor bawah air dan teknologi pemantauan satelit untuk mengawasi pergerakan kapal dan aktivitas di perairan yang sulit dijangkau.

Selain itu, penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi pertahanan harus menjadi prioritas. Dengan mendorong inovasi dan kolaborasi antara institusi penelitian, industri, dan TNI Angkatan Laut, Indonesia dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk tantangan keamanan yang dihadapi. Terhadap komponen *Hard Defense*, TNI Angkatan Laut memiliki peran sangat penting. Gelar kekuatan TNI Angkatan Laut di sekitar ALKI I, Mulai dari Kodaeral III, IV dan XII, hingga Koarmada I akan lebih berdaya guna apabila dilengkapi alat penyelenggara upaya keamanan maritim dengan teknologi terbaru di setiap aspek, mulai dari pengawasan, deteksi hingga penegakkan hukum.



Gambar 3. Konsep Smart Defense dan Dual Strategy
Sumber: Ilustrasi CNBC Indonesia

Soft Defense, adalah upaya dengan menggunakan perangkat lebih tradisional seperti pemberdayaan kearifan lokal. Di sini dapat dilakukan program pelatihan

bagi masyarakat pesisir sangat diperlukan. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan sekitar

mereka (Utina, 2014). Dengan melatih mereka untuk mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan, kita dapat memanfaatkan keahlian lokal ini untuk meningkatkan pengawasan di ALKI I. Selain itu, membangun kemitraan antara TNI Angkatan Laut dan komunitas lokal dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keamanan wilayah. Ketika masyarakat merasa terlibat dan berkontribusi dalam menjaga keamanan, mereka akan lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Kearifan lokal juga dapat berperan dalam strategi mitigasi konflik. Memahami dinamika sosial dan budaya di daerah pesisir dapat membantu dalam merancang program yang lebih efektif untuk mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul akibat pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan (Puspita, n.d.). Dengan menggabungkan teknologi canggih dan pemberdayaan masyarakat lokal, *Smart Defense* menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk menjaga keamanan di ALKI I. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, tetapi juga membangun ketahanan sosial yang lebih kuat di tingkat masyarakat. Melalui kolaborasi antara teknologi dan kearifan lokal, Indonesia dapat menghadapi tantangan keamanan maritim dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dual Strategy merupakan pendekatan yang menggabungkan diplomasi pertahanan dan pengembangan

kekuatan TNI Angkatan Laut (Harindra, 2024). Dalam konteks ALKI I, strategi ini dapat diterapkan melalui pengembangan kemitraan dengan negara-negara tetangga dalam bidang keamanan maritim dapat membantu Indonesia dalam mengatasi ancaman di ALKI I. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan patroli maritim bersama. Indonesia perlu aktif dalam forum-forum internasional untuk mendiskusikan isu-isu keamanan di Laut Cina Selatan. Melalui diplomasi multilateral, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar dan mendorong penyelesaian damai atas sengketa yang ada (Oktavian, 2023; Syukur et al., 2024). Selanjutnya, konsep *Smart Defense* akan dikolaborasikan dengan *Dual Strategy*, yang menekankan pada keseimbangan antara kekuatan TNI Angkatan Laut dan upaya diplomasi pertahanan. Kekuatan TNI Angkatan Laut diperkuat untuk memastikan angkatan bersenjata Indonesia memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, diplomasi pertahanan digunakan untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, sehingga dapat mencegah konflik dan meningkatkan kerja sama dalam bidang keamanan. Dengan menerapkan keduanya, kita berharap dapat tercipta sistem pertahanan dan keamanan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing global. Dengan memadukan teknologi canggih, kearifan lokal, dan diplomasi pertahanan, Indonesia

diharapkan dapat mengeliminasi setiap kemungkinan ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI, baik ancaman dari udara, laut, darat, maupun siber.

PENUTUP

Penerapan konsep **Smart Defense** dan **Dual Strategy** di ALKI I merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan pertahanan laut Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti drone dan sistem radar, Indonesia dapat memperkuat kapasitas pengawasan dan respons terhadap potensi ancaman di perairan nasional. Peningkatan teknologi ini tidak hanya akan membantu dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan, tetapi juga dalam mencegah tindakan ilegal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan harus menjadi prioritas untuk memastikan efektivitas sistem pertahanan yang ada.

Selain itu, pemberdayaan kearifan lokal melalui pelatihan masyarakat pesisir juga menjadi aspek krusial dalam *Smart Defense*. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam menjaga keamanan wilayah mereka akan lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Oleh karena itu, membangun kemitraan yang kuat antara TNI Angkatan Laut dan komunitas lokal akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keamanan bersama. Kearifan

lokal dapat berfungsi sebagai alat mitigasi konflik yang efektif, membantu meredakan ketegangan yang mungkin muncul akibat perbedaan kepentingan di perairan.

Akhirnya, *Dual Strategy* yang mengombinasikan kekuatan militer dan diplomasi pertahanan sangat penting dalam konteks ALKI I. Melalui kerja sama dengan negara-negara tetangga dan partisipasi dalam forum internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi tantangan di Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Dengan memadukan teknologi modern, kearifan lokal, dan diplomasi yang efektif, Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem pertahanan yang tangguh dan adaptif, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI secara berkelanjutan. Implementasi kedua konsep ini akan menjadi fondasi bagi keamanan nasional yang lebih baik dan berdaya saing di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakrie, S. (2022). *Air traffic control smart defense strategi pertahanan laut di ibu kota nusantara*. Penerbit Widina. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/568131-air-traffic-control-smart-defense-strate-221fad31.pdf>
- Baylon, P. B. A. (2021). Kajian validitas klaim China atas wilayah Laut China Selatan melalui nine dash line. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1),

- 1-10. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1986>
- Bachtiar, A. (2024). Peran tradisi dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan di pesisir Indonesia. *Jurnal Nusantara*, 1(1), 1-15. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/17183>
- BNPP. (2023). BNPP gagasan terbentuknya sistem pengawasan maritim dan sistem keamanan laut nasional terintegrasi. <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-gagasan-terbentuknya-sistem-pengawasan-maritim-dan-sistem-keamanan-laut-nasional-terintegrasi>
- Dotulung, A. M. (2020). Fungsi radar surveillance IMSS dalam mendukung keamanan dan keselamatan maritim di Selat Sunda. *Indonesian Maritime Journal*, 1(1), 1-10. <https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/download/47/35>
- Harindra, M. (2024). Strategi pertahanan Indonesia dalam perlindungan kawasan maritim. Lembaga Ketahanan Nasional. <https://lemhannas.go.id/publikasi/ppid/press-release-detail/248-strategi-pertahanan-indonesia-dalam-perlindungan-kawasan-maritim/en>
- Kompas. (2021, December 4). Apa itu nine dash line yang sering dipakai China untuk klaim Natuna? <https://internasional.kompas.com/read/2021/12/04/150000970/apa-itu-nine-dash-line-yang-sering-dipakai-china-untuk-klaim-natuna?page=all>
- Maulana, F. R. (2020). Analisis putusan Permanent Court of Arbitration terhadap klaim nine dash line Tiongkok. *Jurnal Utama Ilmu Politik dan Sosial Sida Simpuh*, 1(1), 1-15. <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/download/10452/6581/29455>
- Mongabay. (2016a, August 24). Perompakan nelayan di Selat Karimata, dalam tiga bulan kerugian capai Rp16,5 miliar. <https://mongabay.co.id/2016/08/24/perompakan-nelayan-di-selat-karimata-dalam-tiga-bulan-kerugian-capai-rp165-miliar/>
- Mongabay. (2016b, August 26). Polda Lampung sebut baru dua perompakan di Selat Karimata <https://mongabay.co.id/2016/08/26/polda-lampung-sebut-baru-dua-perompakan-di-selat-karimata/>
- Oktavian, A. (2023). Penguatan kerjasama ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam penanganan kejahatan lintas negara. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(3), 236-250. <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/474>
- Pemerintah Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46096/uu-no-6-tahun-1996>
- Pemerintah Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan. <https://bphn.go.id/data/dokuments/02pp037.pdf>
- Puspita, M. (n.d.). Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya

- pesisir. *Jurnal Sabda*, 1(1), 1-20. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/download/13253/10038>
- Saraswati, N., & Pinatih, A. P. (2020). Strategi keamanan maritim Indonesia di kawasan Selat Malaka. *SIBATIK Journal*, 1(1), 1-15. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/2800/1251/4713>
- Syukur, M. A., et al. (2024). *Diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara ASEAN di Laut China Selatan*. CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/569602/diplomasi-pertahanan-indonesia-dengan-negara-negara-asean-di-laut-china-selatan>
- Terra Drone. (2023). Drone di industri maritim: Mengawasi aktivitas laut untuk keamanan dan perlindungan lingkungan. <https://terra-drone.co.id/drone-di-industri-maritim-mengawasi-aktivitas-laut-untuk-keamanan-dan-perlindungan-lingkungan/>
- United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- Utina, R. (2014). Kearifan suku Bajo menjaga kelestarian pesisir dan laut. Mongabay. <https://mongabay.co.id/2014/01/26/kearifan-suku-bajo-menjaga-kelestarian-pesisir-dan-laut/>
- Wicaksa, A. (2019). Strategi keamanan Republik Indonesia di Selat Malaka. *Indonesian Journal of International Studies*, 1(1), 1-15. <https://ijis.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/ijis/article/download/14/2/45>
- Wicaksono, J. (2023). Aplikasi pola pertahanan Smart Defense dan Dual Strategy pada komponen utama pertahanan matra laut Indonesia. *Maritime Journal Indonesia*, 1(1), 1-20. <https://maritimejournal.id/index.php/jmi/article/view/17>